

Politisasi Elpiji

Oleh: Hendra Kurniawan

rencana kenaikan harga elpiji sebelumnya. Menko Perekonomian dan Menteri ESDM langsung menimpakan kesalahan pada Pertamina aspek tidak mempertimbangkan aspek sosial ekonomi pascakenaikan harga elpiji nonsubsidi itu.

Kenyataan di lapangan memang kenaikan harga elpiji yang terlampaui tinggi ini sangat memberatkan masyarakat terutama para pedagang makanan. Penolakan yang semakin keras dari berbagai kelompok masyarakat membuat presiden tidak

tetapi muncul dugaan bahwa respon cepat pemerintah ini dinodai oleh kepentingan politik. Sikap saling menyalahkan memberi kesan ada pihak yang dijadikan korban dan ada yang ingin tampil sebagai pahlawan.

Masyarakat menjadi korban

Memasuki Tahun Politik memang nyata-nyata telah membawa pengaruh besar terhadap kinerja pemerintah. Polemik kenaikan harga elpiji menjadi bukti carut-marutnya manajemen pemerintahan saat ini.

Sebetulnya sejak bulan November 2013 yang lalu, Pertamina sudah memberikan sinyalemen akan perlunya kenaikan harga elpiji. Dengan asumsi kerugian sekitar Rp 5.000,- untuk setiap kilogram gas elpiji, maka Pertamina mengisyaratkan perlunya kenaikan harga gas elpiji sebesar minimal Rp 2.500,- per kilogramnya. Tentu perhitungan Pertamina ini bukanlah main-main sehingga sudah semestinya mendapat perhatian dari pemerintah.

hanya prihatin namun juga segera turun tangan. Hari Minggu 5 Januari sesuai melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Presiden SBY mengutarakan rapat kabinet terbatas untuk merespon keresahan masyarakat terkait kenaikan harga elpiji. Dalam rapat sekitar dua jam tersebut, Presiden SBY memerintahkan Pertamina dan Menteri BUMN untuk meninjau kembali kenaikan harga elpiji dalam tenggat waktu 1 x 24 jam.

Pada akhirnya Pertamina mengambil langkah diplomatis dengan menaikkan harga elpiji hanya Rp 1.000,- per kilogram bukan Rp 3.500,- per kilogramnya. Presiden SBY sangat mengapresiasi keputusan ini karena sesuai dengan arahan dan petunjuk yang diberikannya. Akan

Hajatan politik Pemilu 2014 telah demikian memabukkan dan mengaburkan tanggung jawab para pejabat negara. Koordinasi internal yang amburadul menunjukkan ketidakfokusan pemerintah mengurus negara di masa akhir kekuasaannya. Perlu dipahami bahwa kebijakan menaikkan harga elpiji merupakan kebijakan pemerintah, bukan semata-mata kebijakan korporasi dalam hal ini Pertamina.

Kenyataan bahwa Pertamina mengalami kerugian sehingga perlu menaikkan harga elpiji sebenarnya tidak dapat dipungkiri. Pertamina memang berada dalam posisi yang dilematis. Menaikkan harga elpiji menjadi kewajiban yang harus dilakukan demi menutup kerugian.

Di sisi lain, keputusan yang sangat sensitif dan berisiko karena berdampak besar bagi hajat hidup orang banyak ini ternyata tidak mendapat *back up* dari pemerintah. Padahal Pertamina jelas merupakan bagian dari pemerintah. Menjadi sangat ironis ketika para pejabat terkait mengaku tidak mengetahui adanya rencana kenaikan harga elpiji dan kemudian menjadikan Pertamina sebagai objek penderita.

Saat ini semua pihak termasuk yang duduk di pemerintahan memiliki agenda masing-masing demi meraih simpati dan meraup kesuksesan dalam Pemilu mendatang. Kalangan DPR beramai-ramai menolak dan meminta Pertamina membatalkan keputusannya. Tidak hanya itu beberapa partai politik juga turut bersuara menolak kenaikan harga elpiji. Sudah barang tentu kecaman-kecaman yang dilancarkan partai-partai politik (termasuk partai pendukung pemerintah) terkait kenaikan harga elpiji bertujuan untuk mengeruk keuntungan jelang Pemilu 2014. Semua pihak berusaha agar tampak heroik di mata publik demi popularitas dan pencitraan politik.

Apabila semangat macam ini yang terus dihidupi oleh para pemimpin kita maka entah kapan negara kita dapat bangkit dari keterpurukan. Masyarakat saat ini sudah cerdas dan tidak mudah dibodohi. Sekecil apapun langkah pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat pasti akan mendapat sorotan. Bagaimanapun setiap kebijakan pemerintah yang ditunggangi kepentingan politis pasti akan membuat masyarakat menjadi korban.

Semoga Pemilu 2014 mendatang mampu melahirkan pemerintahan baru yang benar-benar mengabdikan untuk rakyat secara tulus tanpa akal bulus. ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

MASYARAKAT terhenyak karena mendapat kado tahun baru yang mengejutkan. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 harga elpiji kemasan 12 kilogram mengalami kenaikan secara serentak di seluruh Indonesia dengan kisaran kenaikan harga sekitar 50 persen. Di Jakarta saja dari yang sebelumnya seharga Rp 78.000,- melonjak drastis menjadi Rp 138.000,- per tabungnya atau berarti naik 68 persen. Masyarakat beralih menggunakan tabung elpiji kemasan 3 kilogram yang disubsidi pemerintah. Tak ayal lagi gas elpiji 3 kilogram menjadi langka di pasaran.

Alasan utama yang menyebabkan harga elpiji mengalami kenaikan dilatarbelakangi oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan kerugian Pertamina sebesar Rp 7,7 triliun setiap tahunnya. Kerugian ini disebabkan terutama karena pemberlakuan harga elpiji kemasan 12 kilogram yang terlalu rendah. Elpiji 12 kilogram tidak mendapatkan subsidi dan harganya ditentukan oleh pemerintah. Ini berbeda dengan elpiji 3 kilogram yang disubsidi oleh pemerintah. BPK dalam pemeriksaannya merekomendasikan kenaikan harga untuk mengurangi kerugian Pertamina.

Sebetulnya sejak bulan November 2013 yang lalu, Pertamina sudah memberikan sinyalemen akan perlunya kenaikan harga elpiji. Dengan asumsi kerugian sekitar Rp 5.000,- untuk setiap kilogram gas elpiji, maka Pertamina mengisyaratkan perlunya kenaikan harga gas elpiji sebesar minimal Rp 2.500,- per kilogramnya. Tentu perhitungan Pertamina ini bukanlah main-main sehingga sudah semestinya mendapat perhatian dari pemerintah.

Maka menjadi sangat janggal ketika kebijakan kenaikan harga elpiji kemudian menjadi aksi saling tuding dan menyalahkan dalam lingkup internal pemerintahan. Presiden bahkan dikabarkan tidak mengetahui